



**LAPORAN KUNJUNGAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KUNJUNGAN KERJA UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) KE PROVINSI SULAWESI UTARA**

5 – 8 DESEMBER 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Kunjungan Kerja Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 – 8 Desember 2021 didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 38/PIMP/III/2020-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang pembentukan Panitia Kerja BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2021.

B. SUSUNAN DELEGASI

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI / KOMISI	POSISI
1.	Sihar P.H. Sitorus	A-139	PDI Perjuangan / Komisi XI	Ketua Panja / Wakil Ketua BKSAP
2.	I Made Urip	A-230	PDI Perjuangan / Komisi IV	Anggota Panja
3.	Effendi Sianipar	A-144	PDI Perjuangan / Komisi IV	Anggota Panja
4.	Singgih Januratmoko	A-305	P. Golkar / Komisi VI	Anggota Panja

5.	Arzeti Bilbina Setyawan	A-32	PKB / Komisi IX	Anggota Panja
6.	Heru Widodo	A-55	PKB / Komisi III	Anggota Panja
7.	Muslim	A-523	P. Demokrat / Komisi IV	Anggota Panja
8.	Sakinah Al-Jufri	A-456	PKS / Komisi X	Anggota Panja

C. VISI DAN MISI KUNJUNGAN DELEGASI

1. Memenuhi fungsi DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait sejauh mana pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Memberikan evaluasi dan bertukar pengalaman dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk kemudian dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah pemilihan masing-masing.
3. Mendengarkan keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, untuk kemudian dapat ditindaklanjuti kepada Pemerintah di dalam Rapat-Rapat Kerja di Komisi terkait.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi delegasi yang hadir pada pertemuan ini dipersiapkan dan diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP yang berupa Saran Butir Wicara.

II.ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

PUKUL	KEGIATAN/TEMPAT	KETERANGAN
MINGGU, 5 DESEMBER 2021		
10. 30 WIB	Keberangkatan Delegasi Panja BKSAP DPR RI untuk TPB/SDGs menuju Manado, Sulawesi Utara dari Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pesawat GA 600 ▪ Terminal III
14. 55 WITA	Tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara	
	Check in hotel Sutan Raja	Jln. Raya Manado - Bitung Watutumou III, Kecamatan

PUKUL	KEGIATAN/TEMPAT	KETERANGAN
		Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
SENIN, 6 DESEMBER 2021		
09.00 WITA	Keberangkatan menuju Kantor Gubernur	
09.30 WITA	Pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olly Dondokambey, S.E, beserta jajarannya	Tempat : Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No.69, Teling Atas, Kec.Wanea, Kota Manado, Sulut
12.00 – 13.00	Makan siang, Sholat	
13.00 – 15.00	Peninjauan ke KEK Bitung, Manado	
SELASA, 7 NOVEMBER 2021		
09.00 WITA	Keberangkatan menuju PLTS Likupang	
10.00 WITA	Ketibaan di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Likupang	Jl. Likupang-Girian, Wineru, Likupang Tim, Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara
12.00 – 14.00	Makan siang, Sholat	
14.00 WITA	Kunjungan lapangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang	Pantai Pulisan di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara
RABU, 8 NOVEMBER 2021		
07.40 WITA	Take off dari Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado	Pesawat ID6271 (Batik Air)
09.53 WIB	Ketibaan di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng	

B. PERTEMUAN

1. Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyambut delegasi DPR RI dan berharap pertemuan kali ini akan memiliki dampak yang nyata kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara.



Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyambut Delegasi DPR RI

Dalam presentasinya, Gubernur Sulawesi Utara menyatakan kesiapan Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung dan Likupang. Beberapa hal yang telah disiapkan oleh Provinsi Sulawesi Utara adalah dari target lahan seluas 2000 Hektar, yang sudah disetujui sekitar 327 Hektar, dan akan diserahkan kepada swasta untuk pengelolaannya. Pendanaan terkait infrastruktur kedua lokasi KEK tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dampak langsung dari pembangunan kedua KEK tersebut kepada masyarakat sekitar adalah telah dibangun sekitar 300 unit rumah di desa sekitar lokasi tersebut.

Peraturan terkait pengelolaan mineral dan pertambangan telah diterbitkan oleh Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara sejak tahun 2015. Walaupun diharapkan proses pembangunan KEK berjalan lancar, dulu pernah ada permasalahan dengan masyarakat terkait izin tambang bijih besi. Masyarakat menggugat izin tersebut dan dinyatakan kalah setelah melalui proses persidangan.

Permasalahan muncul karena akibat penambangan, menyebabkan berkurangnya lahan bagi masyarakat.



Delegasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BKSAP DPR RI

Diharapkan di masa mendatang masalah tersebut tidak mencuat kembali, karena di dalam Peraturan Pemerintah no. 50, peruntukan lahan di KEK Likupang adalah untuk sektor pariwisata, maka tidak boleh ada penambangan. Permasalahan lainnya adalah sudah habisnya masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) dari PTP XIV, dimana selama HGU tersebut masih dipegang, justru tidak dikelola dengan baik, dan ketika Pemerintah Sulawesi Utara mengelola, mereka justru tidak bisa terima.



Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Terkait konversi lahan, walaupun KEK Likupang mencakup beberapa lahan masyarakat, hal tersebut tidak akan mengganggu lahan pertanian rakyat yang masih produktif. Beberapa lahan paling produktif di Sulawesi Utara berada di Minahasa dan Bolaang Mongondow. Sementara di Sangihe izin tambang tidak ada masalah, karena Pemerintah telah mengizinkan hal tersebut dalam bentuk kontrak karya.

KEK Bitung sendiri memang masih menyisakan masalah karena belum diterbitkannya surat resmi. Pengurusan izinnya terkendala diadakannya Pilkada dan disusul merebaknya pandemi Covid-19. Hanya saja semua kendala tersebut telah menemukan solusinya, karena semua sertifikat telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Pemerintah Provinsi. Investasi sejumlah 32 Triliun juga sudah masuk, dan industri perikanan sudah mulai bangkit di Bitung

Gubernur Sulawesi Utara juga memaparkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dari yang pada tahun 2020 berkisar – 0,8 Persen menjadi 8,4 persen pada semester kedua dan ketiga. Pertumbuhan ekonomi sedikit banyak dipengaruhi oleh efektifnya kebijakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, walaupun tidak seketat yang diterapkan di Pulau Jawa.

Gubernur juga memaparkan beberapa kemajuan terkait Food Estate, hanya saja beberapa terpaksa ditutup karena lahan HGU yang sudah kadaluarsa. Walaupun sekarang agak dibatasi karena khawatir berbenturan dengan kepentingan tanah garapan masyarakat.

Pemerintah Sulawesi Utara juga sudah mengajukan pembangunan Rumah Sakit di KEK Minahasa Utara. Permasalahannya adalah keterbatasan jumlah penerimaan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Beberapa universitas swasta memiliki Rumah Sakit, hanya saja kebanyakan hanya memiliki Program Studi Keperawatan, sehingga tidak menjadi solusi kekurangan jumlah dokter.

Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara memaparkan terkait beberapa rencana event pariwisata tahunan yang akan diselenggarakan di Sulawesi Utara, antara lain: 1). Bunaken Festival, 2). International Fishing Competition, 3). Likupang Tourism Festival, dan beberapa event lainnya.

2. Wakil Ketua BKSAP, Dr. Sihar P.H. Sitorus

Dr. Sihar P.H. Sitorus sebagai Ketua Delegasi memberikan beberapa catatan penting. Salah satu yang menjadi sorotan beliau adalah HGU yang sudah habis masa berlakunya. Pemerintah Sulawesi Utara harus memastikan kepastian hukum terkait status lahan tersebut, karena ini berkaitan dengan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum juga penting untuk memastikan investasi di KEK tersebut.



Sihar P.H. Sitorus, Wakil Ketua BKSAP memimpin delegasi DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara

Wakil Ketua BKSAP juga menyoroti, walaupun dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 14 Tujuan sudah dipaparkan, masih harus dipastikan sejauh mana hal tersebut mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti berapa luas lahan garapan bagi masyarakat.

3. Partisipasi Anggota DPR RI

Sakinah Al-Jufri (F-PKS) meminta informasi terkait capaian Provinsi Sulawesi Utara dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ia juga menanyakan terkait destinasi utama di Likupang dan berdekatan dengan KEK. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan berbagai hal terkait hal tersebut.



Sakinah Al-Jufri (F-PKS)

Arzeti Bilbina Setyawan (F-PKB) menyoroti peran dan kondisi perempuan di Provinsi Sulawesi Utara. Ia juga berharap kehadiran BKSAP di Provinsi Sulawesi bisa menjadi solusi, terutama dalam mempercepat kemajuan proyek-proyek pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.



Arzeti Bilbina Setyawan (F-PKB)

Muslim (F-PD) mengapresiasi Partnership for the Goals yang telah dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Utara. Ia juga menanyakan apakah kemitraan tersebut masih berjalan dengan baik di kala pandemi. Provinsi Aceh yang merupakan daerah pemilihan beliau, sudah memiliki KAK, hanya saja infrastruktur pendukungnya dirasakan belum memadai, apakah Provinsi Sulawesi Sulawesi memiliki masalah yang sama di sini.



Muslim (F-PD)

Effendi Sianipar (F-PDIP) menanyakan kontribusi apa yang bisa Provinsi Sulawesi Utara berikan kepada ekonomi global. Ia juga mengapresiasi upaya Pemerintah Sulawesi Utara dalam membangun infrastruktur pariwisata, karena di beberapa daerah, sektor pariwisata mampu memutar perekonomian masyarakat.



Effendi Sianipar (F-PDIP)

I Made Urip (F-PDIP) mengapresiasi capaian Provinsi Sulawesi Utara, meskipun di tengah pandemi, mampu mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Bali, yang merupakan daerah pemilihan beliau pertumbuhan ekonominya bahkan mencapai minus 12% selama pandemi. Di tengah situasi seperti ini, Provinsi Sulawesi Utara justru berhasil meningkatkan ekspor produk perikanan dan memenuhi permintaan pasar global.



I Made Urip (F-PDIP)

4. Walikota Bitung, Maurits Mantiri

Walikota Bitung menyatakan bahwa Kota yang dipimpinnya tengah fokus membangun sektor perikanan. Ia menyatakan bahwa tujuh dari 14 kaleng yang diproduksi, berada di Kotamadya yang dipimpinnya. Sektor perikanan menyerap lebih dari empat belas ribu tenaga kerja. Tujuan ekspor utama adalah ke Filipina, Eropa, Amerika, Tiongkok, dan Timur Tengah. Ikan yang paling banyak diekspor adalah Cakalang, sekitar 80 % ikan yang ditangkap.



Maurits Mantiri, Walikota Bitung mempresentasikan rencana pembangunan KEK Likupang

Terkait PLTS Likupang, beliau menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa mendatang. Proyeksi produksi adalah 15 MW dan akan ditingkatkan lagi 15 MW.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Sulawesi Utara dirasakan cukup menggemburkan.
2. Pertumbuhan ekonomi sendiri masih cukup baik, hal ini menjadi catatan penting, karena pertumbuhan tersebut terjadi di kala pandemi Covid-19.

3. Walaupun masih terdapat beberapa masalah terkait alih fungsi lahan masyarakat, hal ini masih dapat diselesaikan dengan baik.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Kunjungan Kerja Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Ke Provinsi Sulawesi Utara ini menggunakan anggaran Rp. 332.271.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil pertemuan sebagai berikut:

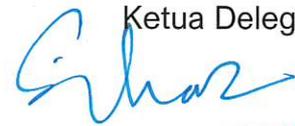
1. Butir Wicara
2. *Berita media elektronik*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Kunjungan Kerja Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2021

Ketua Delegasi,



Sihar P.H. Sitorus

A-139